

ANALISIS DAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DAN KOTA TEGAL

Diffa Rahmatullah¹, Shahifah Maghfirah², Said Furqan³, Ulwan Mahasin⁴, Syahrul Fadli⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syiah Kuala

dfarhmtllh@gmail.com¹, maghfirahshahifah@gmail.com², ssaidfurqan@gmail.com³,
ulwanmhsnn@gmail.com⁴, fadlimdfadli4@gmail.com⁵

Received: 12-06-2024

Revised: 15-06-2024

Approved: 19-06-2024

ABSTRAK

Studi ini mengkaji akuntansi pemerintahan dalam konteks penyediaan informasi keuangan terkait aktivitas keuangan pemerintah, mencakup pencatatan, pengklasifikasian, dan interpretasi transaksi keuangan. Fokus analisis dua daerah adalah: pertama, untuk mengevaluasi kinerja keuangan Daerah; kedua, untuk mengukur kinerja keuangan Daerah Kabupaten Solok dari tahun 2017 hingga 2021 dengan menggunakan rasio efisiensi. Studi juga mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan Kabupaten Jepara pada tahun 2019, dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. Selain itu, dilakukan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, yang mencatat penurunan pendapatan dari tahun 2019 hingga 2020. Simpulan, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dengan fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur. Laporan keuangan menjadi alat akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan, dan oleh karena itu perlu diselidiki dengan cermat.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah berhubungan erat dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia (Jati, 2016). Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi, maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Otonomi daerah di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1974 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974. Namun, implementasinya secara eksplisit dimulai sejak berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 1 dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Fauzi, 2023). UU yang saat ini berlaku adalah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terakhir diubah dengan UU No.9/2015) dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat laporan keuangan pemerintah sendiri, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan arus kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan CALK (Putra & Varina, 2021).

PEMDA yang otonom memiliki keleluasaan dalam penyajian LKPD dan komponen lainnya, tetapi harus tetap memenuhi standar SAP. Perbedaan nama akun dan rincian akun dapat terjadi, namun harus tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam teori komperatif akuntansi pemerintahan menggunakan beberapa basis akuntansi yaitu dimulai dari basis kas, dilanjutkan dengan basis kas menuju basis

akrual dan basis akrual. Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013, dimana basis kas mengakui transaksi saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, Basis kas menuju akrual mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan akuitas dana berbasis akrual dan Basis akrual mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Langelo et al., 2015). Perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa pengaruh terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan, Ketika akrual hendak dilakukan maka yang tergambar adalah informasi operasi dan kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintah gambaran perkembangan operasi atau kegiatan dibuat dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus atau Defisit. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan penentuan laporan keuangan yang berkualitas. Sebuah laporan keuangan yang berkualitas artinya harus memenuhi unsur-unsur atau karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Chairina & Wehartaty, (2019) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang disyaratkan dalam Peraturan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dapat di Perbandingkan maksudnya ialah Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (Herawati, 2022). Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Untuk menilai efisiensi dan efektivitas relatif kedua Pemda dalam memberikan pelayanan kepada penduduknya. Dengan membagi data LKPD berdasarkan jumlah penduduk, kita dapat membandingkan jumlah uang yang dibelanjakan setiap Pemda per kapita untuk berbagai layanan.

Hal ini dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang dimana salah satu Pemda mungkin lebih efisien dibandingkan Pemda lainnya. Dengan membandingkan data LKPD dari tahun yang berbeda, kita dapat melihat perubahan kinerja keuangan masing-masing Pemda. Hal ini dapat berguna untuk mengidentifikasi tren dan membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya. Perbandingan data LKPD dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan baik di tingkat Pemda maupun nasional. Misalnya, PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per Kapita dibedakan atas PDRB per Kapita atas dasar harga konstan dan PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku. PDRB per Kapita atas dasar harga konstan untuk mengetahui apakah

penduduk suatu wilayah lebih sejahtera/miskin dari waktu ke waktu. PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami pertumbuhan sebesar 5,34% atau meningkat sebesar 141,75 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang waktu 2015 – 2019, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,67%. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto selalu positif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal (signaling theory)

Signaling theory merupakan teori yang banyak digunakan untuk mempelajari asimetri informasi antara dua pihak sebagai akibat dari perbedaan pengetahuan di berbagai konteks organisasi dan bisnis (Sutaryo & Tri Amanu, 2020). Signaling theory mempunyai fungsi mengurangi asimetri informasi. Signaler atau pihak dalam yang memiliki informasi akan berusaha mengirimkan sinyal berupa informasi positif sebagai upaya menyampaikan sisi baik organisasi kepada receiver atau pihak ketiga yang akan menerima informasi tersebut. Dalam konteks pemerintahan, signaling theory menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan amanah oleh rakyat akan berusaha untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakatnya (Kurniati & Siddi, 2020). Asimetri informasi terjadi antara pihak pemerintah sebagai pihak dalam dengan masyarakat sebagai pihak luar karena masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai internal pemerintah. Pemerintah akan berusaha mengurangi asimetri informasi tersebut dengan memberikan sinyal berupa informasi positif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra positif pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pemerintah. Pemda dapat menyampaikan sinyal yang positif kepada masyarakat melalui website. Sinyal positif itu dapat berupa informasi keuangan Pemda, informasi kinerja, dan berbagai penjelasan lainnya yang dimuat dalam website pemda yang akan menunjukkan kebaikan dari Pemda tersebut. Pengungkapan informasi positif melalui website ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Pemda telah menjalankan pemerintahan dengan baik sebagai amanat dari masyarakat.

Salah satu masalah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah terjadinya manajemen laba (*earnings management*) atau accrual management melalui perekrayasaan terhadap Pendapatan dan Beban. Pada Pemda, hal ini berimplikasi pada besaran Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit LO. Apakah Pemda “miskin” melakukan manajemen akrual lebih besar dari pemda “kaya”? Apakah Kapasitas Fiskal daerah dapat memprediksi kecenderungan pengaturan akrual ini? Manajemen akrual, atau pendapatan dan beban yang direkrayasa, merupakan praktik di mana pemerintah daerah (Pemda) sengaja memanipulasi laporan keuangan mereka untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan surplus/defisit LO, memenuhi target fiskal, atau memberikan gambaran kinerja keuangan yang lebih baik. Kapasitas fiskal didefinisikan sebagai kemampuan Pemda untuk menghasilkan dan menggunakan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publiknya secara efektif dan berkelanjutan. Pemda dengan kondisi keuangan terbatas mungkin tergoda untuk memanipulasi laporannya agar terlihat lebih baik, misalnya dengan menunda pengakuan beban atau mempercepat pengakuan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi target kinerja keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau untuk menarik investor dan dana hibah. Pemda yang memiliki sumber daya keuangan melimpah mungkin juga menerapkan

manajemen akrual untuk tujuan tertentu, seperti meminimalkan kewajiban pajak atau memberikan sinyal positif kepada pasar modal. Namun, penting untuk dicatat bahwa kapasitas fiskal hanyalah salah satu faktor, dan masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kecenderungan manajemen akrual, seperti:

- Tekanan politik
Pemda yang menghadapi tekanan politik untuk mencapai target kinerja keuangan yang ambisius mungkin lebih termotivasi untuk melakukan manajemen akrual.
- Kualitas tata Kelola
Pemda dengan tata kelola keuangan yang lemah dan kontrol internal yang tidak memadai lebih rentan terhadap praktik manajemen akrual.
- Kemampuan akuntansi
Pemda dengan staf akuntansi yang kurang terampil atau berpengalaman mungkin lebih mudah dimanipulasi untuk melakukan manajemen akrual.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan entitas pemerintahan daerah. Kajian ini melibatkan penggunaan berbagai teknik analisis seperti:

1. Penggunaan Rasio Keuangan: Meliputi rasio likuiditas (seperti current ratio dan quick ratio), rasio solvabilitas (seperti debt-to-equity ratio), dan rasio profitabilitas (seperti return on assets dan return on equity). Rasio-rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan kewajiban serta menghasilkan laba.
2. Trend Analisis: Membandingkan data keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam kinerja keuangan. Trend analisis membantu dalam memahami perubahan jangka panjang dalam kondisi keuangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
3. Analisis Varians: Membandingkan hasil aktual dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dari rencana keuangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan entitas tersebut, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut atau perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Perbandingan laporan keuangan pemerintahan daerah adalah kajian yang menggunakan metodologi untuk membandingkan laporan keuangan antara dua atau lebih entitas pemerintahan daerah. Metode perbandingan ini dapat mencakup:

1. Analisis Horizontal: Membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lain (misalnya tahun demi tahun) untuk mengidentifikasi tren atau

perubahan dalam kinerja keuangan. Analisis ini membantu dalam memahami perkembangan keuangan dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut.

2. Analisis Vertikal: Membandingkan kinerja keuangan dari beberapa entitas pemerintahan daerah pada periode waktu yang sama. Analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam struktur pendapatan, komposisi pengeluaran, efisiensi pengelolaan keuangan, serta kebijakan dan praktik keuangan yang diterapkan.
3. Benchmarking: Membandingkan kinerja keuangan dengan standar atau benchmark industri atau sektor yang relevan. Benchmarking membantu dalam menilai posisi relatif entitas pemerintahan daerah dalam konteks yang lebih luas dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan kinerja.

Tujuan dari perbandingan laporan keuangan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan perspektif yang komparatif tentang kinerja keuangan antara entitas pemerintahan daerah, mengidentifikasi praktik terbaik, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan mengungkapkan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian.

Karakteristik Metode Kualitatif-Deskriptif

Deskripsi dan Gambaran :

Metode ini bertujuan untuk menarik realitas kondisi, situasi, atau fenomena yang diteliti ke permukaan. Ini dilakukan dengan cara memberikan ciri, karakteristik, sifat, model, tanda, atau gambaran yang jelas.

1. Pendekatan Kualitatif: Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ada. Data yang dikumpulkan cenderung bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik.
2. Penggunaan Data Sekunder: Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam. Data ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat dianggap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Analisis Data:

1. Metode Analisis: Data yang dikumpulkan dari LRA tersebut dianalisis menggunakan metode rasio. Metode rasio yang digunakan meliputi:
 - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Untuk mengevaluasi sejauh mana daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri.
 - Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD): Untuk mengukur seberapa efektif pendapatan asli daerah dalam mendukung keuangan daerah.
 - Rasio Kesenjangan: Untuk mengevaluasi kesesuaian antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga menunjukkan keseimbangan anggaran yang tercipta.

2. Tujuan Analisis: Analisis rasio ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi keuangan daerah yang menjadi fokus penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam, serta menggambarkan berbagai aspek penting yang terkait dengan realitas sosial dan ekonomi di kedua daerah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis LKPD satu tahun anggaran Kota Tegal

Realisasi belanja modal dalam LRA dan LO dikaitkan dengan penambahan aset tetap di neraca pada Kota Tegal

AKUN	2019	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Aset Tetap	1.905.953.731.338,13	1.947.040.831.870,85	41.087.100.532,72
LRA	285.575.788.948,16	266.580.982.102,00	(18.994.806.846,16)
LO	277.369.754.443,42	2.376.681.401.498,38	2.099.311.647.054,96

ASET TETAP	2019	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Tanah	881.595.123.751,58	875.385.147.951,58	(6.209.975.800,00)
Peralatan Dan Mesin	482.750.133.261,01	554.829.568.912,08	72.079.435.651,07
Gedung Dan Bangunan	619.344.740.186,00	649.948.956.170,00	30.604.215.984,00
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	665.571.137.011,80	711.723.844.609,80	46.152.707.598,00
Aset Tetap Lainnya	17.668.646.649,20	18.358.345.611,00	689.698.961,80
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.891.463.387,00	4.977.884.527,00	86.421.140,00

Jika dilihat dari table atau LKPD maka dapat disimpulkan beberapa penyebab kenaikan/penurunan aset tetap yang di pengaruhi dari belanja modal.

- a) Aset tanah yang mengalami penurunan sebesar Rp 6.209.975.800,00 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal tanah di neraca.
- b) Aset peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp 72.079.435.651,07 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal peralatan dan mesin di neraca.
- c) Aset Gedung dan bangunan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 30.604.215.984,00 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Gedung dan bangunan di neraca.
- d) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 46.152.707.598,00 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.
- e) Aset lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp 689.698.961,80 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp 86.421.140,00 hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.

Perbandingan LRA dan LO pada Kota Tegal

a. Perbandingan Pendapatan LRA dan Pendapatan dalam LO

	2020
Pendapatan LRA	1.017.915.109.373,00
Pendapatan LO	997.739.612.123,18

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan LRA lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan LO, ini bisa terjadi ketika alasan utamanya ialah LRA menggunakan basis kas yang dimana pendapatan di akui ketika uang diterima lalu untuk LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Jika Pendapatan LRA lebih besar berarti pemerintah daerah menerima pendapatan dari sumber - sumber selain aktivitas operasional seperti pendapatan hibah, bantuan keuangan, dan pendapatan transfer lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan tersebut.

b. Perbandingan Belanja LRA dan Beban dalam LO

	2020
Belanja - LRA	1.184.533.886.000,00
Beban - LO	1.104.013.977.673,71

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja LRA lebih besar dibandingkan beban LO ini bisa terjadi dikarenakan perbedaan basic catatan, namun ada beberapa alasan lain, seperti LRA menyajikan berbagai informasi realisasi anggaran, belanja dan lain lain untuk LO hanya mencatat beban operasional dan ada beberapa akun yang tidak langsung di akui karena bedanya basic catatan.

c. Perbandingan Surplus / Defisit antara LRA dan LO

	2020	2020	2019
Surplus / Defisit LRA	130.173.715.000,00	30.691.386.010,00	9.611.449.369,02
Surplus / Defisit LO	16.588.327.976,53		23.110.264.055,54

Pada tahun 2020, LRA mengalami kondisi Defisit sebesar 30.691.386.010. Kemudian LO mengalami kondisi surplus sebesar 16.588.327.976,53. Dari kondisi di atas dapat dilihat perbandingan nilai yang besar adalah nilai surplus LRA. Untuk LRA, defisit bisa terjadi karena beberapa faktor seperti:

- 1) Pendapatan yang lebih rendah
- 2) Belanja yang lebih tinggi dari anggaran
- 3) Pengeluaran tidak terduga

Pada tahun 2019, LRA Defisit 9.611.449.369,02. Lalu LO mengalami kondisi surplus sebesar 23.110.264.055,54. Dari kondisi di atas dapat dilihat perbandingan nilai yang besar ialah nilai surplus LRA. Untuk LRA, surplus bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti :

- 1) Pendapatan yang tinggi
- 2) Pengeluaran tidak terduga

Kota Sawahlunto

1. Realisasi belanja modal dalam LRA dan LO dikaitkan dengan penambahan aset tetap di neraca pada Kota Sawahlunto.

Nama Akun	2019	2020	Kenaikan/(Penurunan)
Aset tetap	610.763.954.775,30	802.873.919.535,36	192.109.964.760,06
LRA	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	2.366.392.032,57
LO	66.931.862.440,57	51.863.723.699,21	(15.068.138.741,36)

	2019	2020	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset tanah	124.552.505.579,89	126.430.511.579,89	1.878.006.000,00
peralatan dan mesin	244.000.685.689,97	272.149.540.189,75	28.148.854.499,78
gedung dan bangunan	356.837.879.916,54	378.151.052.207,69	21.313.172.291,15
jalan irigasi dan jaringan	685.871.757.476,24	703.187.602.847,69	17.315.845.371,45
Aset tetap lainnya	36.703.709.905,35	51.531.093.068,35	14.827.383.163,00
kontruksi dalam pengerjaan	10.466.777.136,68	11.495.455.475,66	1.028.678.338,98

Jika dilihat dari table atau LKPD, maka dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan aset tetap yang di pengaruhi dari belanja modal :

1. Aset tanah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.878.006.000,00, yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 126.430.511.579,89, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal tanah di neraca.
2. Aset peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp 28.148.854.499,78, yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 272.149.540.189,75, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal peralatan dan mesin di neraca.
3. Aset Gedung dan bangunan yang mengalami kenaikan sebesar 21.313.172.291,15, yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 378.151.052.207,69, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Gedung dan bangunan di neraca.
4. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 17.315.845.371,45, yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 703.187.602.847,69, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.
5. Aset lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.827.383.163,00 yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 51.531.093.068,35, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.
6. Konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.028.678.338,98 yang berasal dari mutasi total penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp 11.495.455.475,66, hal ini dipengaruhi oleh belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca.

2. Perbandingan LRA dan LO pada Kota Sawahlunto
a. Perbandingan Pendapatan LRA dan Pendapatan dalam LO

Nama Akun	2020
Pendapatan - LRA	587.598.325.124,00
Pendapatan - LO	567.006.655.155,11

Pendapatan LRA dan LO di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 menunjukkan pendapatan LRA lebih besar dibandingkan pendapatan LO. Selisihnya Rp 20.591.670.969,00. Dalam analisis akuntansi pemerintahan, perbedaan ini dapat diinterpretasikan sebagai selisih antara pendapatan yang direalisasikan berdasarkan anggaran dengan pendapatan yang diperoleh melalui operasional. Pendapatan LRA mencerminkan pendapatan yang direalisasikan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Sementara Pendapatan LO mencerminkan pendapatan yang diperoleh melalui operasional, seperti Pendapatan dari pajak, biaya, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pengelolaan anggaran, perbedaan dalam sumber pendapatan, atau perbedaan dalam metode penghitungan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan di Kota Sawahlunto.

- b. Perbandingan Belanja LRA dan Beban dalam LO

Nama Akun	2020
Belanja - LRA	540.228.136.333,65
Beban - LO	567.658.057.636,90

Belanja LRA dan Beban LO Kota Sawahlunto tahun 2020 menunjukkan bahwa Beban LO lebih besar daripada Belanja LRA. Selisihnya sebesar Rp 27.429.921.303,25.

Dalam analisis akuntansi pemerintahan, perbedaan ini diinterpretasikan sebagai selisih antara belanja yang direalisasikan pada anggaran dan beban yang direalisasikan melalui operasi. Belanja LRA mencerminkan pengeluaran yang direalisasikan berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Sementara Beban LO mencerminkan beban yang yang diperoleh melalui operasional, seperti biaya, pajak, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan pengendalian anggaran, perbedaan sumber belanja, dan perbedaan metode penghitungan belanja. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan belanja Kota Sawahlunto.

- c. Perbandingan Surplus / Defisit antara LRA dan LO

	2020	2020	2019
Surplus / Defisit LRA	20.001.645.333,65	32.594.205.826,77	15.553.640.366,08
Surplus / Defisit LO	651.402.481,79		44.394.843.711,63

Pada tahun 2020 LRA menunjukkan surplus Rp 32.594.205.826,77. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kelebihan pendapatan pada tahun 2020. LO menunjukkan defisit Rp 44.394.843.711,63. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kekurangan arus kas operasi pada tahun 2020. Perbedaan antara surplus LRA dan defisit LO menunjukkan bahwa meskipun

pemerintah daerah mengalami kelebihan pendapatan, namun masih terdapat kekurangan arus kas operasi.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Belanja operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan yang direalisasi.
2. Penundaan pembayaran piutang oleh pihak lain.
3. Pengeluaran kas untuk investasi.

Pada tahun 2019, LRA menunjukkan surplus Rp 15.553.640.366,08. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kelebihan pendapatan pada tahun 2019. LO menunjukkan defisit Rp 651.402.481,79.

Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kekurangan arus kas operasi pada tahun 2019. Perbedaan antara surplus LRA dan defisit LO menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mengalami kelebihan pendapatan, namun masih terdapat kekurangan arus kas operasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Belanja operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan yang direalisasi.
2. Penundaan pembayaran piutang oleh pihak lain.
3. Pengeluaran kas untuk investasi.

B. Perbandingan dua LKPD

1. Urutan penyajian

Kota Sawahlunto	Kota Tegal
a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca	c. Neraca
d. Laporan Operasional	d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas	e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas	f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan	g. Catatan atas Laporan Keuangan

2. Komponen dalam LKPD, Perbandingan komponen LKPD diperlukan untuk mengetahui kelengkapan/jumlah akun yang disajikan dalam LKPD.

a. Perbandingan Akun dalam Neraca :

Kota Sawahlunto :

➤ Aset lancar

Aset lancar yang terdapat di LKPD Sawahlunto terdiri dari :

- a) Kas, Kas Dibendahara Penerima, Kas Di Bendahara Pengeluaran, Rekening Koran (Masuk) Bendahara Umum Daerah.
- b) Piutang Pajak Daerah.
- c) Piutang Retribusi Daerah.
- d) Bagian Lancar Dari Tagihan Penjualan Angsuran.
- e) Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMN/BUMD Dan Lembaga Internasional.
- f) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

- g) Piutang Lain – Lain.
- h) Persediaan.
- Aset Tetap
Aset tetap yang terdapat di LKPD Sawahlunto terdiri dari :
 - a) Tanah.
 - b) Peralatan dan mesin.
 - c) Gedung dan bangunan .
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan.
 - e) Aset tetap lainnya .
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
- Jumlah akun kas pada LKPD Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) akun kas
- Pada akun Aset lancar, investasi jangka Panjang dan aset tetap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
- Format dan jumlah kolom dalam neraca LKPD Tahun 2020 dan 2019 sama dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Karena Format tersebut sangat mudah untuk membandingkan nilai aset dan liabilitas pada tahun 2020 dan 2019.

Kota Tegal :

- Aset lancar
Aset lancar yang terdapat di LKPD Kota Tegal terdiri dari :
 - a) Kas di daerah, kas dibendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas di bendahara BOS.
 - b) Investasi jangka pendek.
 - c) Piutang.
 - d) Piutang lain – lain terdiri dari piutang, bagian lancar penjualan angsuran, ganti rugi atas kekayaan daerah, hasil penjualan barang milik daerah, deviden, bagi hasil laba usaha Perusahaan daerah dan fasilitas sosial dan umum.
 - e) Persediaan.
- Aset Tetap
Aset tetap yang terdapat di LKPD Kota Tegal terdiri dari :
 - a) Tanah.
 - b) Peralatan dan mesin.
 - c) Gedung dan bangunan.
 - d) Jalan, irigasi, dan jaringan.
 - e) Asset tetap lainnya .
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
 - g) Akumulasi penyusutan.
- Jumlah akun kas pada LKPD Sawahlunto terdiri dari 5 (lima) akun kas.
- Pada akun Aset Lancar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi pada akun Investasi Jangka Panjang dan Asset Tetap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
- Format dan jumlah kolom dalam neraca LKPD Tahun 2020 dan 2019 sama dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di

Indonesia. Karena Format tersebut sangat mudah untuk membandingkan nilai aset dan liabilitas pada tahun 2020 dan 2019.

- b. Perbandingan Akun dalam LRA
 1. Komponen PAD yang ada di dalam LRA Kota Sawahlunto dan Kota Tegal memiliki komponen yang sama.
 2. Perbandingan total anggaran PAD untuk Kota Sawahlunto mengalami surplus dan Kota Tegal mengalami defisit. Untuk realisasi Kota Sawahlunto mengalami surplus dan Kota Tegal Mengalami defisit.
- c. Perbandingan Akun dalam LO
 1. Perbandingan Pendapatan LRA Kota Sawahlunto dan Kota Tegal menunjukkan bahwa Pendapatan LRA pada Kota Tegal lebih tinggi dari Kota Sawahlunto.
 2. Perbandingan Pendapatan LO Kota Sawahlunto dan Kota Tegal menunjukkan bahwa pendapatan LO pada Kota Tegal lebih tinggi dari Kota Sawahlunto.
 3. Perbandingan Belanja LRA Kota Sawahlunto dan Kota Tegal menunjukkan bahwa Belanja LRA pada Kota Tegal lebih tinggi dari Kota Sawahlunto.
 4. Perbandingan Beban LO Kota Sawahlunto dan Kota Tegal menunjukkan bahwa Beban LO pada Kota Tegal lebih tinggi dari Kota Sawahlunto.
- d. Perbandingan Format dan substansi Catatan atas Laporan Keuangan
 1. Bab I CALK untuk Kota Sawahlunto dan Kota tegal menjelaskan catatan yang sama.
 2. Bab II CALK untuk Kota Sawahlunto ada dijelaskan mengenai kebijakan belanja, sedangkan pada Kota Tegal terdapat penjelasan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
 3. Bab III CALK untuk Kota Sawahlunto menjelaskan secara rinci mengenai pendapatan dan belanja dan juga menambahkan informasi tambahan mengenai surplus/defisit dan SiLPA. Sedangkan pada Kota Tegal menjelaskan secara rinci juga mengenai pendapatan dan belanja dan juga menambahkan informasi tambahan mengenai rasio kinerja.
 4. Bab IV CALK untuk Kota Sawahlunto dan Kota Tegal menjelaskan catatan yang sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dan Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa kedua kota ini menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam berbagai aspek penting terkait dengan manajemen keuangan dan pelaporan mereka. Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa aspek ekonomi kuncinya, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengindikasikan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari segi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Kota Sawahlunto menunjukkan penurunan pendapatan dari tahun 2019 hingga 2020, yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk memastikan kelangsungan keuangan daerah. Sementara itu, Kota Tegal menunjukkan dinamika yang berbeda dalam LKPD-nya.

Perbandingan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengakuan pendapatan dan belanja antara basis kas (LRA) dan basis akrual (LO). Perbedaan ini mencerminkan tantangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran yang berbeda serta pentingnya penggunaan informasi yang konsisten dalam pengambilan keputusan keuangan. Analisis lebih lanjut terhadap perbandingan aset tetap antara kedua kota menunjukkan bahwa Kota Tegal memiliki peningkatan yang signifikan dalam belanja modal, yang mencerminkan upaya untuk memperkuat infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Sementara itu, Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dalam aset tetapnya, yang mungkin perlu didukung dengan strategi pengembangan infrastruktur yang lebih progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairina, F., & Wehartaty, T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkpd Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073>
- Fauzi, A. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), 181–198. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198>
- Herawati, T. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Star*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.44>
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6295>
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>